

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN BANDUNG

**Titin Rohayatin, Agustina Setiawan, Dadan Kurnia,
Noer Aptika Fuji Lestari, Siti Munawaroh, Widuri Wulandari**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id

Abstract

In the context of implementing regional government, the most important thing is how the village government is able to improve the welfare of the village community and be able to increase the competitiveness of the village. This is only possible if the affairs under the authority of the village can be carried out properly supported by the human resource capabilities of the village apparatus. Thus, the Government Science Study Program FISIP Unjani organizes community service to increase the capacity of village government officials in Bandung Regency. The method of activity is carried out in 3 (three) stages, namely preparation, implementation and evaluation. In carrying out the activities, conducting training and technical guidance as well as standardizing professional competencies and certifications, developing training collaborations, developing community learning through the village academy 4.0 digital platform based on village innovation. The results of the activity can be said to be effective because it is able to help improve the quality of Human Resources for Village Heads, Village Secretaries, Village Treasurers, other Village Apparatuses and Village Assistants in the context of Village Government management and Village Asset Management in order to improve quality in providing services to public..

Keywords: Education, Training, Governance, Human Resources, Government Apparatus, Village.

Abstrak

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dari aparatur desanya. Dengan demikian, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Metode kegiatan yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis serta membuat standarisasi kompetensi dan sertifikasi profesi, pengembangan kerjasama pelatihan, pengembangan pembelajaran masyarakat melalui platform digital akademi desa 4.0 berbasis inovasi desa. Hasil kegiatan dapat dikatakan efektif karena mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa lainnya dan pendamping Desa dalam rangka tata kelola manajemen Pemerintah Desa dan tata Kelola Aset Desa dalam rangka peningkatan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kata kunci: Pendidikan, Pelatihan, Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, Aparatur Pemerintahan, Desa

PENDAHULUAN

Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi

garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan

dan kapasitas aparatur desa memegang peranan yang sangat penting. Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dari aparatur desanya. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit terwujud jika kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa. Namun demikian sampai saat ini secara umum kapasitas perangkat desa belum diketahui secara pasti.

Menurut Cahyani dalam (Aisyah, dkk (2017) bahwa penyelenggara pemerintah harus memiliki sikap yang profesionalisme, karena dengan profesionalisme menjadikan diri seorang untuk bersikap dan berperilaku dengan baik dan akan

meningkatkan kinerja yang dihasilkannya, sehingga profesionalisme kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Selain itu, terkait dengan kinerja aparatur pemerintahan juga perlu dilihat bagaimana kapasitas yang dimilikinya. Menurut Morgan dalam (Alam & Prawitno, 2015) kapasitas dalam sebuah organisasi dapat dilihat dari kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, serta kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia aparat desa. Melalui UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi pemerintah desa dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan di desa. Sehingga kapasitas aparat yang memadai sangat menentukan keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan terutama sumber daya keuangan desa dalam jumlah besar dapat dikelola secara tepat guna, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan terutama mengatasi kemiskinan desa.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa juga turut mengatur pengembangan kapasitas pemerintahan desa melalui manajemen

desa yang mencakup: (1) kebijakan pemerintahan desa, (2) perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan kebijakan penyusunan peraturan di desa.

Notoatmodjo (2003:72) dalam bukunya Pengembangan Sumber Daya Manusia, disebutkan bahwa tuntutan yang terasa kuat untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia baik oleh organisasi pemerintah maupun swasta adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia masih relatif rendah;
- 2) Suasana kerja yang kurang menyenangkan atau adanya kejenuhan karena terlalu lama bekerja pada suatu tempat;
- 3) Adanya tuntutan organisasi terhadap perubahan;
- 4) Adanya perkembangan zaman yang sangat pesat;

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada dasarnya merupakan transformasi peran yang menuntut kemampuan, cara kerja, cara pikir, dan peran baru dari SDM. Untuk dapat melakukan proses repositioning dengan baik, maka organisasi perlu mempersiapkan SDM yang mampu bersaing di masa depan. Proses pengembangan sumber daya manusia terdiri dari dua aspek menurut Rivai dkk. (2014:79) yaitu sebagai berikut.

1. Perilaku SDM berkaitan dengan peningkatan inisiatif bekerja dalam diri seseorang dan untuk itu diperlukan etos kerja yang baik seperti peningkatan kualitas, inovasi, dan pengurangan biaya.
2. Kompetensi SDM berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dari sumber daya yang dibutuhkan yang

meliputi kompetensi tenaga kerja, diversitas angkatan kerja, dukungan kompetitif tenaga kerja, dan globalisasi tenaga kerja.

Salah satu langkah strategi yang dilakukan oleh Kemendagri adalah meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa (PKAD), PKAD adalah pelatihan yang ditujukan kepada unsur pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretariat Desa dan Bendahara Desa serta unsur pemerintah kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparat pemerintahan desa, pengelolaan program/kegiatan dan aparat pemerintah kecamatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. (Kristiono, 2018)

Berbagai permasalahan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa seperti ketidak sesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaannya. Pelaksanaan otonomi daerah harusnya dijadikan sebuah kesempatan kewenangan untuk mengelola SDM aparatur pemerintah desa dengan lebih baik. Dengan adanya permasalahan mengenai kurangnya pemahaman para aparatur pemerintahan desa mengenai tata kelola sumber daya manusia maka dosen-dosen dilingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani Cimahi, menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi para aparatur pemerintahan desa se Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan roda

pemerintahannya di Kabupaten Bandung.

METODE

Metode yang digunakan dalam menunjang keberhasilan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Se Kabupaten Bandung”, Program Studi Ilmu Pemerintahan Unjani menggunakan pendekatan seperti:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini seluruh tim Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan sebagai penyelenggara dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mempersiapkan diri dengan membuat program kegiatan, menentukan tema kegiatan, menentukan materi kegiatan, menentukan pameri kegiatan, membuat Flyer kegiatan. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan berbagai instansi antara lain dengan Kemendes, DPMPD Provinsi Jawa Barat, DPMD Kabupaten Bandung Barat dan pihak akademisi terkait kesediaan sebagai nara sumber dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tersebut.. Selain itu menyebarkan Flyer kegiatan baik dikirim secara personal ke instansi pemerintah Terkait melalui WA, email instansi pemerintah dan melalui surat resmi yang dikirim ke beberapa Pemerintah Daerah khususnya yang berada di Wilayah Jawa Barat. Flyer kegiatan juga di share melalui media sosial, penyebaran Flyer kegiatan melalui rekanan Kerja, bahkan untuk wilayah Jawa Barat dibantu oleh Staf DPMPD Jawa Barat dalam penyebaran Fleyer kegiatan tersebut. Alhasil yang mendaftar dalam kegiatan ini relative banyak sampai 911 peserta dari seluruh Indonesia dan Timur Leste.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan titik puncak dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 melalui pelaksanaan Webinar. Pelaksanaan Webinar ini bersifat *Hybrid* yaitu dilakukan secara *on line* dan *off line*. Pelaksanaan *on line* diperuntukan bagi para peserta webinar antara lain para Kepala Desa, Sekretaris dan bendahara desa, Perangkat Desa Lainnya, Pembina Desa di seluruh Indonesia, perwakilan Dosen dan beberapa perwakilan dari mahasiswa serta ada lainnya yaitu unsur masyarakat secara umum dan beberapa Aparatur Sipil Negara serta ada dari Kementerian Dalam Negeri yang antusias ingin mengetahui dan memahami tentang tata Kelola SDM dan Aset Desa tersebut. Sedangkan yang bersifat *Off line* diperuntukan bagi seluruh tim dosen program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan seluruh pimpinan dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pimpinan pada tingkat Universitas. Walaupun dalam kegiatan ini dilaksanakan secara *Hybrid*, namun tetap dilakukan sesi diskusi yang mendalam. Diskusi adalah pertukaran pengetahuan dan pengalaman berupa gagasan atau pendapat mengenai suatu topik tertentu secara bebas antara peserta dan fasilitator yang sifatnya saling koreksi (Amirudin & Musyasaroh, 2022)

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi ini merupakan tahapan terakhir dalam kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini. Pada tahap kegiatan ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengevaluasi seluruh kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaan, pembuatan laporan kegiatan

sampai kepada luaran kegiatan termasuk dalam perihal publikasi hasil kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Se Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

1. Waktu kegiatan
 - a. Persiapan kegiatan Pengmas secara keseluruhan dilaksanakan selama 5 bulan, dari pembuatan proposal, pengiriman informasi terkait kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Aset Desa, koordinasi dengan para Nara Sumber, penentuan tema kegiatan dan pembuatan Flyer Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
 - b. Pengiriman informasi dilakukan melalui surat resmi disertakan Flyer Kegiatan dan Susunan Acara kegiatan yang dikirim melalui alamat email dan WA beberapa Onstansi Pemerintah, pengiriman Surat secara langsung kepada beberapa Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Bandung Raya dan dilakukan Kerjasama dengan DPMPD Jawa Barat dan beberapa DPMD Pemerintah Kabupaten baik yang berada di Jawa

Barat maupun di Luar Jawa Barat. Serta dengan menshare Flyer kegiatan melalui media social dan rekanan kerja secara personal yang dijadikan agen dalam kegiatan ini.

- c. Kegiatan Webinar dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dari mulai pukul 07.³⁰ sampai dengan pukul 16.⁰⁰ WIB. Kurun waktu tersebut terbagi atas sesi pembukaan dari pukul 08.⁰⁰ sampai dengan pukul 09.⁰⁰. pemberian materi dan diskusi secara panel mulai dari pukul 09.⁰⁰ sampai dengan pukul 12.⁰⁰. Sesi *coaching* tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Aset Desa mulai dari pukul 13.⁰⁰ sampai dengan pukul 16.⁰⁰ WIB

2. Sifat Kegiatan dan Tempat Kegiatan
 - a. Kegiatan PPM ini dilaksanakan bersifat *Hybrid* yaitu bersifat *On line* dan bersifat *off line*.
 - b. Kegiatan yang bersifat *on line* bagi seluruh Pemateri dan seluruh peserta kegiatan dalam webinar yaitu para Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa, Perangkat Desa lainnya, Pembina Desa di seluruh Indonesia, masyarakat Umum, beberapa Aparatur Sipil Negara, perwakilan Dosen dan perwakilan mahasiswa. Kegiatan Webinar ini bertempat di

- kediaman masing-masing pemateri dan masing-masing Peserta kegiatan,
- c. Kegiatan yang bersifat *Off Line* bagi seluruh tim dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai tim pelaksana dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Para pimpinan tingkat Fakultas (FISIP) dan Pimpinan tingkat Universitas (Unjani). Kegiatan *Off Line* diselenggarakan di Ruang Multimedia Lantai 3 Gedung Jenderal TNI Mulyono FISIP Unjani yang beralamat di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Cimahi.
3. Peserta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Peserta kegiatan Webinar sebanyak 911 orang yang merupakan unsur Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa, Perangkat Desa, Pembina Desa, Masyarakat Umum, Aparatur Sipil Negara seluruh Indonesia, perwakilan Dosen dan perwakilan mahasiswa bahkan ada beberapa peserta dari Luar Negeri salah satunya peserta dari Timur Leste. Jumlah Peserta ini di dapat dari peserta yang mendaftar dan yang mengisi daftar kehadiran dalam *Google Form* sebagai peserta dalam kegiatan ini.
 - b. Dari jumlah peserta kegiatan sebanyak 911 peserta jika diprosentasekan sebagai berikut: Unsur Kepala Desa sebesar 10,7 %, Sekretaris dan Bendahara Desa sebesar 17,3 %, Pendamping Desa sebesar 29 %, Perangkat Desa lainnya sebesar 15,8 %, masyarakat umum lainnya 11,1 %, perwakilan dosen 9% dan perwakilan mahasiswa sebesar 7,1 %.
 - c. Jika melihat hasil presentasi dari jumlah peserta kegiatan terlihat bahwa unsur yang berada dalam tataran Pemerintah Desa memiliki antusias yang tinggi mengikuti acara kegiatan tersebut.
 4. Pemateri
Pemateri dalam kegiatan Webinar Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Aset Desa terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut:
 - a. Jajang Abdullah, S.Pd.,M.Si (Sekretaris BPSDM Kemendes)
 - b. Nugi Ganjar Nugraha S.S.STP sebagai Kasi. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 - c. Rambey SP.,M.Si sebagai Kepala Bidang Administrasi Desa DPMD Kabupaten Bandung Barat
 - d. Dr. Riant Nugroho sebagai Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai analisis kebijakan
 - e. Dr. Titin Rohayatin, S.IP., M.Si
 - f. Dr, Agustina Setiawan, S.IP.,M.Si

- g. Dr. Arlan Siddha, S.IP.,MA dan Tim Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Materi
Materi dalam kegiatan webinar sebagai berikut:
- Tata Kelola SDM Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Peran SDM dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Pemerintah Desa
 - Strategi Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa
 - Tantangan dan Masa Depan Pemerintah Desa Dilihat dari Perspektif Kebijakan
 - Coaching* atau tutorial dan Pendampingan mengenai perilaku dan Budaya Kerja Aparatur Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa
6. Tahapan Webinar.
Dalam tahapan Webinar ini merupakan tahapan pemberian materi yang terbagi atas:
- Tata Kelola/ Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Peran SDM Dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Pemerintah Desa
 - Strategi Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa.
 - Tantangan dan Masa Depan Pemerintah Desa dilihat dari Perspektif Kebijakan
- Repositioning* dalam Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa
 - Coaching* Budaya Kerja Aparatur Pemerintahan Desa
 - Coaching* Administrasi Pemerintahan Desa
7. Beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan PPM ini
- Sekretaris BPSDM Kemendes Bapak Jajang Abdullah, S.Pd.,M.Si sebaga Nara Sumber
 - DPMPD Provinsi Jawa Barat Bapak Nugi Ganjar Nugraha S.S.STP sebagai Kasi. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan selaku Nara Sumber
 - DPMPD Kabupaten Bandung Barat Bapak Rambey SP.,M.Si sebagai Kepala Bidang Administrasi Desa DPMD Kabupaten Bandung Barat selaku Nara Sumber
 - Pihak Akademisi Bapak Dr. Riant Nugroho sebagai Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai analisis kebijakan selaku Nara Sumber
 - Rektor Unjani
 - Pimpinan FISIP Unjani
 - Para Kepala Desa seluruh Indonesia
 - Para Sekretaris dan Bendahara Desa
 - Perangkat Desa
 - Pendamping Desa
 - Masyarakat Umum lainnya
 - Aparatur Sipil Negara
 - Perwakilan Dosen
 - Perwakilan Mahasiswa

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani telah berhasil dilaksanakan. Para aparatur pemerintahan desa diberikan pemahaman serta coaching terkait beberapa hal sesuai dengan materi yang telah ditentukan seperti:

a. Tata Kelola SDM

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbicara tata Kelola SDM dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa diawali dengan Program Kerja/program kegiatan, rencana kerja tahunan, bicara struktur organisasi, tugas dan fungsi serta berbicara berbagai regulasi yang mengatur tentang Pemerintah Desa. Dari program kegiatan tahunan dalam rangka peningkatan SDM salah satunya melalui kegiatan pelatihan pendampingan Desa, pelatihan Uji Kompetensi dan sertifikasi TPP, Penyusunan NSPK pendamping Desa, penyusunan Kepmendesa, petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa dan penyusunan petunjuk pelaksanaan TPP.

Pengelolaan Pendamping Desa. Monitoring, sosialisasi, konsolidasi dan evaluasi TPP serta recruitmen TPP serta kegiatan dalam Peningkatan kapasitas P3PD. Penyusunan regulasi dan kebijakan teknis, Penyusunan Rencana pelatihan dan program pelatihan. Selanjutnya juga melakukan pelatihan dan bimbingan teknis serta membuat standarisasi kompetensi dan sertifikasi profesi, pengembangan kerjasama pelatihan, pengembangan pembelajaran masyarakat melalui Platform digital akademi desa 4.0 berbasis inovasi desa. Begitu juga adanya pelatihan Badan Pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan Transmigrasi. Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan dapat mewujudkan Sumber daya Manusia yang handal yang mampu menata dan mengelola dalam tataran Pemerintah Desa,

b. Peran SDM dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Pemerintah Desa

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Desa dalam hal ini diawali dari berbagai kebijakan baik kebijakan yang bersifat Nasional atau undang-undang maupun yang bersifat daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah. Begitu juga dideskripsikan tentang gambaran umum desa yang berada di wilayah Jawa Barat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan desa diantaranya Pendapatan Asli Desa, dana desa dari alokasi APBN, alokasi dana desa dari DAU dan DBH, bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu juga dideskripsikan tentang pembanguan desa yang melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana desa, pembangunan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan. Selain itu juga berbicara tentang mandat pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan berbicara tentang Sumber daya manusia desa termasuk program unggulan DPM Desa misalnya melalui program AKSARA (Akademi Desa Juara) sasaranya adalah Kepala Desa, BPD, perangkat desa dan LKD/ penggelak Desa Komunitas. Ada beberapa target dari kegiatan AKSARA yaitu Desa Juara melalui Mandiri, visioner, berprestasi dan Inovatif. Program lain dalam kegiatan SABISA (Sakola Bisnis Desa) Sabisa merupakan sebuah program penguatan kapasitas Bisnis BUMDesa secara terpadu mulai pelatihan/ workshop, pemagangan/ sekolah lapangan sampai dengan kemitraan/ Kerjasama bisnis. Program lain melalui Sakola Tata Ruang, Sakola tata ruang ini memberikan edukasi dan pembinaan kepada ASN Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam penataan ruang desa. Tata Kunci Kolaborasi dan Inovasi melalui Penta Helix yang meliputi kolaborasi antara

- Pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media,
- c. Strategi Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa
- Berbicara tentang Strategi tata Kelola Keuangan dan Aset Desa diawali dengan berbicara pada Tujuan Nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 serta didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan regulasi Pemerintah Desa yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengelola keuangan dan aset Desa. Dalam hal ini juga dijelaskan kedudukan keuangan desa, area resiko dalam implementasi Pengelolaan keuangan desa, Asas pengelolaan keuangan Desa, tantangan dalam implementasi asas pengelolaan Keuangan desa serta tantangan dalam implementasi pengelolaan keuangan desa serta berbicara unsur-unsur yang dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan azas pengelolaan keuangan desa serta strategi dalam pengelolaan keuangan desa dan asset desa. Berbicara tentang dasar hukum berbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, Desa juga pada dasarnya membangun paradigma. Tatkala bicara tentang kedudukan desa berbicara tentang Hak Asal Usul Desa, Lokal Berskala Desa, Penugasan dan lain-lain penugasan. Berbicara tentang Area Risiko dalam implementasi pengelolaan Keuangan Desa ini berbicara tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Asas pengelolaan keuangan desa berbicara tentang APBD Desa dan bersifat transparansi serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa salahsatunya adalah berbicara tentang Akuntabel, dan partisipatif.
- d. Tantangan dan Masa Depan Pemerintah Desa
- Dilihat dari Perspektif Kebijakan Berbicara tentang Tantangan dan Masa Depan Pemerintah Desa dilihat dari Perspektif Kebijakan dalam hal ini melalui metode Cara lama dan Cara baru. Cara lama

pembangunan dan kemajuan berarti konotasi dan matinya desa. Desa menjadi Museum dan objek dari konotasi. Desa tetap miskin dan tetap seperti itu sehingga mengkota menjadi pilihan satu-satunya. Sementara mengkota adalah pilihan yang tidak pasti lagi di masa depan. Dengan pertumbuhan yang semakin tersebar, teknologi digital yang membuat setiap orang menjadi sejahtera di mana saja. Dengan Pola/ cara baru Desa tidak identik dengan keterbelakangan, kebodohan atau kemiskinan. Desa adalah masa depan Indonesia, Tetan Ndeso tapi maju, cerdas dan sejahtera dan kita harus memulai sekarang. Metoda dan cara yang digunakan adalah metode DISRUPSI. Disrupsi tingkat nasional Kemendes PDT menjadi Panglima pembangunan Bappenas menjadi pendukungnya, Hebatkan Renstra dan kebijakan ditingkat nasional khususnya di Kemendes PDT, kolaborasi dengan seluruh desa di Indonesia dan penyokong kebijakan disrupsi, dan kolaborasi dengan setiap mitra strategis.

e. *Coaching* atau tutorial dan Pendampingan mengenai perilaku dan Budaya Kerja Aparatur Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Melakukan tutorial atau klinik bagi para kepala Desa, sekretaris desa, bendahara desa, perangkat desa dan pendamping desa perihal tentang tata Kelola administrasi desa, perilaku budaya aparatur Pemerintah Desa. Dalam hal ini diberikan pemahaman bagaimana tata Kelola pemerintahan desa yang efektif, ramping struktur kaya fungsi dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Begitu juga diberikan pemahaman terkait etika dan budaya organisasi serta perilaku organisasi atas kriteria, indicator, nilai dan norma yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Serta bagaimana tips dan strategi membuat program skala prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta bagaimana cara menjalin kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun dengan luar instansi pemerintah.

Dengan berbagai bentuk atau metode yang diberikan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa lainnya dan pendamping Desa dalam rangka tata Kelola manajemen Pemerintah Desa dan tata Kelola Aset Desa dalam rangka peningkatan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dalam tata Kelola Sumber Daya Aparatur dan tata Kelola manajemen Pemerintahan Desa

sangatlah penting, mengingat bahwa Pemerintah Desa merupakan pintu gerbang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bahkan Pemerintah Desa merupakan ujung tombak dari Pemerintah Nasional. Pemerintah Desa merupakan Garda terdepan dalam penyelenggaraan Pemerintah Nasional. Pemerintah Desa mempunyai kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara nasional. Indikator keberhasilan dari Pemerintah Nasional diawali dari keberhasilan dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diawali dari Pemerintah desa. Karena Pemerintah Desa adalah merupakan Lembaga organisasi pemerintahan yang pertama kali berhubungan dengan masyarakat, keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Pusat salah satu factor utama ditentukan oleh keberhasilan proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Desa.

Selain itu juga dalam hal ini diharapkan mampu membentuk karakter, menanamkan rasa kedisiplinan baik secara individu maupun secara organisasi bagi aparatur Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa, membentuk perilaku individu dalam organisasi Pemerintah Desa, menerapkan jiwa kepemimpinan, menanamkan budaya organisasi dan perilaku organisasi, menciptakan suasana kekeluargaan, menanamkan membangun Kerjasama dalam organisasi, dapat merancang dan merumuskan program kerja organisasi Pemerintah Desa,

Terdeskripsikan dengan jelas melalui diskusi dalam kegiatan webinar ini ternyata dalam implementasinya penyelenggaraan pemerintah desa ini terdapat permasalahan yang kompleks dan heterogeny, mulai dari penerapan kebijakan yang terkait mengatur tentang Pemerintah Desa, Aset Desa, program

pemerintah Desa yang belum berjalan dengan baik, anggaran yang tidak mencukupi, dan seolah permasalahan semakin kompleks karena dalam penanganannya terjadi kelambanan sehingga berdampak kepada proses penyelenggaraan pemerintahan, Atas dasar terdapatnya permasalahan yang sangat kompleks ini diyakini dibutuhkan aparatur Sumber Daya manusia yang handal yang mempunyai kemampuan untuk dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi tersebut



Gambar 1: Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan



Gambar 2: Penyampaian Materi dari Narasumber

SIMPULAN

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Sumber Daya Manusia dan Aset Desa ini dapat membantu memberikan pemahaman,

wawasan yang luas serta dapat membantu meningkatkan kualitas SDM bagi aparatur Pemerintah Desa dalam melakukan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Desa serta memberikan pemahaman terhadap tata Kelola Aset Desa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari hibah internal Unjani, yang pendanaan bersumber dari LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Oleh karena itu tim dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unjani atas kepercayaan dan pendanaan yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Prawitno, A. (2015). Pengembangan kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93-104.
- Amirudin, N., & Musyasaroh. (2022). Pendidikan Moderasi Beragama Melalui Pelatihan Retorika Dakwah Pada Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Gresik. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 1638-1643.
- Fajar, A. M., Utami, W., Sunardi, & Sudarsih. (2017). Kualitas Sumber Daya Manusia, Profesionalisme Kerja, Dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten

Jember. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV(1), 131-135.

- Kristiono, N. (2018). Modul pelatihan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Semarang: Rsearchgate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/324247614_Modul_Pelatihan_Aparatur_Desa

Notoatmodjo, Soekidjo., 2003, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

Rivai, Veithzal. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa